

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah menurut etimologis bersumber dari kata Yunani yang berarti nahkoda kapal atau *kubernan* yang memiliki makna melihat ke arah depan, menetapkan kebijakan yang telah diselenggarakan untuk memenuhi tujuan dari masyarakat dan negara di masa mendatang dan mempersiapkan tahapan untuk menempuh suatu perkembangan dari masyarakat serta mengelola dan memfokuskan masyarakat untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. (Surbakti, 1992)

Pemerintah pusat maupun daerah memiliki kewajiban untuk melakukan pengelolaan keuangan negara dalam bentuk penyusunan laporan keuangan, hal tersebut sebagai bentuk akuntabilitas atas realisasi kerja yang dilakukan pemerintah. Sejak tahun 2003 pemerintah melakukan perombakan terkait akuntansi sektor publik dengan menerbitkan Paket UU Keuangan Negara, yaitu Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Pada tahun 2015, telah terjadi reformasi dalam melakukan penyusunan laporan keuangan. Penggunaan akuntansi berbasis akrual secara penuh telah diterapkan dalam lingkungan pemerintah Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Penerapan SAP dengan basis akrual disajikan ke dalam Neraca dan Laporan Operasional. Sedangkan, penerapan SAP berbasis kas disajikan ke dalam Laporan Realisasi Anggaran. Sederhananya, implementasi akuntansi dengan basis akrual ini memiliki tujuan menghadapi kelangkaan basis kas dalam hal pemberian data yang saksama pada saat digunakan oleh pengguna informasi serta agar dapat menggambarkan kinerja pemerintah yang komprehensif.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ialah SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal Efektif. PSAP 02 juga mengatur tentang kualifikasi yang berkaitan dengan penyajian Laporan Realisasi Anggaran dan pengungkapan atas informasi yang terkait. Laporan Realisasi Anggaran memiliki beberapa unsur, salah satunya adalah belanja. Berdasarkan PSAP 02 Paragraf 34, klasifikasi belanja terdiri dari klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi. Salah satu contoh belanja yang berdasarkan klasifikasi ekonomi ialah belanja operasi, yang umumnya memiliki anggaran paling besar untuk memenuhi kebutuhan dasar serta mendukung aktivitas pemerintah yang bermanfaat dalam jangka pendek. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja hibah, belanja subsidi serta belanja bantuan sosial.

Pada penulisan karya tulis ini, penulis menjadikan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung sebagai objek yang akan ditinjau terkait dengan akuntansi belanja operasi dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan akuntansi pemerintah daerah. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung merupakan salah satu perangkat daerah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Sebagai unit pemerintahan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung tidak lepas dari pelaksanaan belanja operasi dengan tujuan untuk memberikan pelayanan pemerintah di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif kepada masyarakat Provinsi Lampung, sehingga untuk mewujudkan pelaksanaan akuntansi pemerintah yang transparan, akuntabel dan auditable, penerapan akuntansi belanja operasi harus diterapkan dengan baik dan benar sesuai dengan SAP yang berlaku.

Pada Laporan Keuangan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2020, realisasi belanja mencapai Rp20.655.625.967. Realisasi belanja tersebut terdiri atas belanja operasi dan belanja modal. Bagian yang paling dominan ialah belanja operasi sehingga penulis memilih untuk meninjau belanja operasi tersebut, jumlah realisasi nya mencapai Rp20.608.917.467 yang terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp9.205.219.617 dan belanja barang sebesar Rp11.503.697.850.

Selain itu, berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, realisasi otonomi daerah memiliki tujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan rakyat dengan cara meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Seiring berjalan dengan prinsip tersebut, di kehidupan nyata, masih terdapat instansi pemerintahan yang mencoba untuk meningkatkan anggaran terkait belanja akan tetapi tidak dimanfaatkan dengan optimal untuk kepentingan masyarakatnya. Sehingga membuat prinsip *good governance* yang berupa meningkatkan efektivitas pelaksanaan otonomi daerah jadi tidak sejalan.

Disisi lain, jika terdapat sistem yang masih kurang baik nantinya dapat memberikan dampak buruk berupa kurangnya kualitas atas laporan keuangan yang dapat menimbulkan indikasi berupa kekeliruan ataupun penyimpangan dalam bidang keuangan, sehingga nantinya akan menyebabkan kerugian negara maupun daerah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis memiliki keinginan untuk meninjau terkait kesesuaian antara penerapan akuntansi belanja operasi pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dengan ketentuan yang berlaku. Tinjauan tersebut berupa definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, serta pengungkapan belanja operasi yang terdapat pada dinas yang terkait. Oleh sebab itu, penulis menyusun karya tulis tugas akhir ini dengan judul “Tinjauan atas Penerapan Akuntansi Belanja Operasi pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung”.

1.2 Rumusan Masalah

Atas pembahasan latar belakang tersebut, penulis dapat menelaah rumusan masalah yang terbentuk, yakni:

- a. Apakah definisi dan klasifikasi dari belanja operasi pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku?
- b. Apakah penerapan pengakuan dan pengukuran belanja operasi pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku?
- c. Apakah penerapan penyajian dan pengungkapan belanja operasi pada laporan keuangan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kesesuaian definisi dan klasifikasi dari belanja operasi pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi;
- b. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan pengakuan dan pengukuran belanja operasi pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi;
- c. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan penyajian dan pengungkapan belanja operasi pada laporan keuangan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam melakukan penyusunan KTTA ini, penulis membatasi ruang lingkup pada topik yang akan dibahas. Fokus pembahasan karya tulis ini terkait dengan Penerapan Akuntansi Belanja Operasi pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung yang mencakup tinjauan pengklasifikasian, pengakuan, pengukuran, dan penyajian serta pengungkapan atas akuntansi belanja operasi dengan menggunakan laporan keuangan Tahun 2020 yang kemudian dibandingkan

dengan kesesuaian kriteria dan prinsip yang berlaku dalam Standar Akuntansi Pemerintah dan peraturan lainnya.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan dari penulisan karya tulis ini antara lain :

a. Manfaat Akademis

Penulisan karya tulis yang dilakukan dengan harapan untuk menambah wawasan tentang akuntansi belanja operasi pada Disparekraf Provinsi Lampung serta dapat menjadi sarana dalam mengembangkan ilmu pengetahuan atas apa yang telah dipelajari secara teoritis pada saat menjalani perkuliahan.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi penulis, penyusunan karya tulis ini memiliki tujuan sebagai pengamalan mata kuliah yang telah didapat penulis selama menjalani perkuliahan terkait bidang akuntansi pemerintah, terlebih khusus akuntansi belanja operasi.
- 2) Bagi instansi terkait, penulisan karya tulis yang dilakukan diharapkan dapat menjadi sebuah referensi bagi Disparekraf Provinsi Lampung dalam melaksanakan penerapan akuntansi belanja operasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Bagi peneliti selanjutnya, penulisan karya tulis yang dilakukan dengan harapan bisa dijadikan referensi untuk penulis selanjutnya dalam melakukan pengembangan ide karya tulis yang lebih baik.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini nantinya akan menjelaskan karya tulis yang dilakukan oleh penulis. Penulis akan menjelaskan terkait latar belakang, ruang lingkup, manfaat, dan sistematika atas penulisan atas Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan terkait teori dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan akuntansi belanja operasi. Bagian ini digunakan sebagai landasan untuk melakukan pembahasan atas akuntansi belanja operasional yang bersumberkan dari jurnal, ketentuan perundang-undangan, dan standar akuntansi pemerintahan.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan terkait metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan serta pembahasan hasil, yakni pembahasan terkait tinjauan atas penerapan akuntansi belanja operasi pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung. Pembahasan tersebut menggunakan dasar teori dan peraturan perundang-undangan yang dijelaskan pada bab sebelumnya.

BAB IV KESIMPULAN

Bab ini akan menjelaskan kesimpulan atas topik yang telah dibahas dari bab-bab sebelumnya dengan didasarkan landasan teori dan fakta yang terjadi terkait masalah yang dibahas, serta hasil tersebut diharapkan dapat bermanfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan.